

# Artikel 2

*by Paper 2*

---

**Submission date:** 01-Dec-2022 07:43PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1968204027

**File name:** MULTIKULTURAL\_DAN\_PENDIDIKAN\_KARAKTER.pdf (150.66K)

**Word count:** 2652

**Character count:** 18645

# MULTIKULTURAL DAN PENDIDIKAN KARAKTER

Oleh : Abd. Jabar Abdul

Komp. Kebun Cengkeh, Batu Merah Atas, Ambon

## Abstrak:

4 Multikulturalisme sebagai paham yang menghendaki pengakuan dan penghargaan terhadap keanekaragaman suku bangsa yang hidup dalam komunitasnya dengan beragam budaya saat ini menjadi bagian penting dalam menjamin eksistensi, stabilitas, kelangsungan dan kemajuan bangsa Indonesia. Fenomena kekerasan atas nama suku, komunitas, budaya, dan agama yang mewarnai kehidupan bangsa saat ini menunjukkan terkikisnya kesadaran multikultural dan menipis (buruknya) karakter bangsa. Bangsa yang maju bangsa yang berbudaya, dan bangsa yang berbudaya bangsa yang memiliki karakter baik dan kokoh sesuai nilai-nilai luhur bangsanya. Membangun bangsa harus diawali dengan meletakkan landasan karakter baik dan kokoh yang dapat memberi supor, jaminan dan ruang bagi berkembangnya kehidupan multikultural sebagai entitas keindonesiaan.

**Kata Kunci:** *Multikulturalisme dan Pendidikan karakter.*

## Pendahuluan

1 Negara bangsa (*nation-State*) Indonesia terdiri atas sejumlah besar kelompok-kelompok etnis, budaya, agama dan lain-lain. Hefner (2007) mengilustrasikan Indonesia seperti Malaysia dan Singapura memiliki warisan dan tantangan pluralisme budaya (*cultural pluralism*) secara lebih mencolok, sehingga dipandang sebagai “lokus klasik” bagi bentuk baru “masyarakat majemuk” (*plural society*). Kemajemukan masyarakat Indonesia paling dapat dilihat dari dua cirinya yang unik, pertama secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan, dan kedua secara vertikal, ditandai oleh adanya perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam (Nasikun, 2007).

Fenomena masyarakat dan kompleks kebudayaannya yang *plural* (jamak) dan *heterogen* (aneka ragam) itu tergambar dalam prinsip *bhinneka tunggal ika*, tetapi terintegrasi dalam kesatuan (Kusumohamidjojo:2000). Namun, pengalaman bangsa Indonesia sejak masa awal kemerdekaan, khususnya di masa demokrasi terpimpin Presiden Soekarno dan Orde Baru Presiden Soeharto memperlihatkan kecenderungan kuat terhadap politik *monokulturalisme*. Dalam politik ini, yang diberlakukan bukan penghormatan terhadap keragaman (Kebhinekaan, atau *multikulturalisme*), tetapi sebaliknya, keseragaman (*monokulturalisme*) atas nama stabilitas untuk pembangunan (Azra:2006).

Bangsa Indonesia dalam dua dasawarsa terakhir banyak meraih kemajuan, meskipun banyak persoalan yang dihadapi. Keruntuhan sentralisasi Orde Baru yang memaksakan

mpnokulturalisme pada gilirannya telah memunculkan kesadaran pentingnya memahami kembali kebhinnekaan, multikulturalisme Indonesia. Di samping itu, wacana multikulturalisme Indonesia yang semakin mendapat tempat dalam masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa kondisi sebagaimana dikemukakan Saifudidin (2006). Pertama, desentralisasi mendorong ditingkatkan batas-batas identitas kebudayaan di Indonesia, baik identitas etnik, agama, maupun golongan. Integrasi sosial dan nasional mendapat tantangan besar dari perubahan yang terjadi. Kedua, desentralisasi politik masa kini kurang memperhatikan dimensi kebudayaan. Keputusan untuk melaksanakan desentralisasi lebih pada keputusan politik oleh para elit politik partai ketimbang mempertimbangkan dimensi kebudayaan yang sesungguhnya sangat mendasar penting. Ketiga, ketika batas-batas kebudayaan itu semakin nyata dan tajam, dan orientasi primordialisme mulai memicu konflik yang tajam antar etnik, agama dan golongan, dan gejala ini dikuatirkan mengancam integrasi bangsa, para elit politik tergesa-gesa mencari obat penawarnya, mencari strategi untuk membangun kembali integrasi bangsa dan kebudayaan mulai diperhatikan.

### Multikulturalisme dan kebangsaan Indonesia

Multikulturalisme<sup>15</sup> dibentuk dari kata *multi* (banyak), *kultur* (budaya), dan *isme* (aliran/faham). Kata itu berarti menunjukkan pengakuan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaan masing-masing yang unik. Setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama komunitasnya. Abraham<sup>23</sup> Maslow dalam *Theory of Human Motivation* yang dikutip Mahfud (2009) menjelaskan salah satu kebutuhan dasar manusia (*basic needs*) pengakuan/penghargaan. Pengikatan suatu masyarakat terhadap kebutuhan untuk diakui (*politics of recognition*) merupakan akar dari segala ketimpangan dalam berbagai bidang kehidupan.

Multikulturalisme<sup>19</sup> lazim dimaknai sebagai sebuah pengesahan yang positif tentang keanekaragaman komunal yang muncul dari perbedaan-perbedaan ras, etnis, bahasa dan kepercayaan religius. Ia lebih merupakan suatu porsi alih-alih sebuah doktrin politik yang serasi dan programatik. Hubungan antar etnik yang sering digandengkan dengan multikultural, menurut Kymlicka idealnya merupakan suatu pengakuan, penghargaan, dan keadilan terhadap etnik minoritas baik yang menyangkut hal-hal universal yang melekat pada hak-hak individu maupun komunitasnya yang bersifat kolektif dalam mengekspresikan kebudayaannya. Lawrence A. Blum menjelaskan, multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, dan sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan-kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri (Supardan:2008).

<sup>26</sup> Kata kunci multikulturalisme, menurut Supardan, pengakuan<sup>3</sup> adanya perbedaan dan penghargaan, dua kata yang selama ini sering dikontaskan. Perbedaan multikulturalisme tidak berlandaskan pada pemilikan yang mengisaratkan pada memiliki atau dimiliki budaya tertentu,

melainkan berlandaskan pada kesadaran untuk menghargai dan menghormati yang mampu bernegosiasi tentang rumusan-rumusan<sup>2</sup> yang ada. Ia tidak seutuhnya merupakan bagian ataupun sama sekali terpisah dari budayanya. Keanekaragaman budaya bukan faktor penentu pemecah-belah bangsa, melainkan diharapkan mampu menjadi “bumbu kehidupan” bagi perekat kehidupan bangsa.

Bhinneka Tunggal Ika sebagai motto negara yang secara harfiah<sup>9</sup> diartikan sebagai bercerai berai tetapi satu. Motto ini digunakan sebagai ilustrasi dari jati diri bangsa Indonesia yang secara natural, dan sosial kultural dibangun di atas keanekaragaman (etnis, bahasa, budaya dan lain-lain). Jika dikaji secara akademis, Bhinneka Tunggal Ika tersebut dapat dipahami dalam konteks konsep generik multikulturalisme. Indonesia dikonsepsikan dan dibangun sebagai *multicultural nation-state* dalam konteks negara-kebangsaan Indonesia modern, bukan sebagai *monocultural nation-state*. Indonesia bangsa yang pluralis, mungkin paling pluralis di dunia. Bangsa ini terdiri ratusan etnis, agama, budaya dan adat istiadat, yang tersebar disekitar 13.000 pulau besar dan kecil, serta berbicara dalam ratusan bahasa daerah (Koentjaraningrat, 1970). Pluralisme multidimensional ini telah membentuk mozaik keindonesiaan yang indah, sekaligus rawan terhadap konflik. Ketidakmampuan mengelola pluralisme inilah bisa mendorong terjadi gejala sosial politik yang bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, Antar golongan) dan separatis.

Perlu dicatat bahwa multikulturalisme bukan kecenderungan pada eksklusifisme dan fanatisme etnis yang sempit. Fanatisme etnis akan menyulut konflik secara potensial yang memang selalu ada dan *inheren* dalam masyarakat yang<sup>3</sup> multi-etnik baik yang disebabkan oleh *stereotype* maupun prasangka-prasangka sosial lainnya. Bagaimana agar sesuatu yang potensial dalam arti negatif, tidak menjadi aktual? Diperlukan mengatur agar kebutuhan dan kebenaran multikulturalisme itu menjadi penetapan ideologis sebagai bangsa Indonesia dari semua etnis, golongan, agama, budaya, bahasa yang beraneka ragam itu merasakan satu bangsa yang benar-benar dihayati, dan diamalkan, tanpa menghilangkan identitas “primordial” yang kaya dengan perbedaan itu.

<sup>10</sup> Bangsa Indonesia tidak mungkin dilartukan identitasnya sebagai orang Jawa, Sunda, Batak, Minang, Dayak, Bugis, Ambon, Islam, Hindu, Kristen Budha, dan seterusnya. Tindakan itu tidak akan dapat menciptakan identitas Indonesia yang sesungguhnya, melainkan akan menghancurkan identitas yang sebenarnya. Bangsa Indonesia tidak mungkin dapat dibangun oleh selain orang Indonesia sendiri. Persatuan bangsa yang dicapai hanya sebuah persatuan semu yang dibangun oleh identitas atas ritus-ritus kenegaraan yang kosong.

<sup>3</sup> Kemajemukan etnik dan budaya di Indonesia itu sudah kondusif bagi penerapan pendekatan multikultural. Indonesia yang memiliki motto kenegaraan Bhinneka Tunggal Ika hakiki dan mengungkapkan kebenaran historis yang tidak dapat<sup>3</sup> disangkal lagi sejak zaman-zaman kerajaan dahulu. Bangsa Indonesia secara antropologis yang kaya keragaman etnis, budaya, agama, bahasa, adat-istiadat yang hidup ditengah masyarakat plural tergantung dari lokal genius yang bersifat primordial (Sumardjo, 2002). Lokal genius yang primordial itu ditentukan oleh

genesis infra struktur penghidupan masyarakat. Ada <sup>2</sup>tujuh unsur kebudayaan, baik yang kecil, terisolasi-sederhana, maupun yang besar kompleks-maju. Ketujuh unsur itu bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religim dan kesenian (Koentjaraningrat, 1986).

### Mengapa Perlu Pendidikan Karakter

<sup>7</sup>UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Bab II pasal 3 menyatakan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis <sup>25</sup>dan bertanggung jawab. Proklamator RI, Bung Karno, pernah menyatakan betapa penting pembangunan karakter bangsa, *Nation and Character Bulding*, agar bangsa ini memiliki harga diri, sebagai bangsa yang berdaulat, sehingga tidak dipandang rendah oleh bangsa lain dalam percaturan politik dunia.

<sup>17</sup>Jika dicermati perjalanan hidup bangsa ini selama satu dasawarsa di era reformasi, tampak adanya indikasi bahwa bangsa ini telah kehilangan stamina dan jati diri sebagai bangsa timur yang memiliki falsafah hidup yang *adiluhung*, Pancasila. Kondisi negeri ini semakin carut-marut. Kondisi paling mengesankan bagi bangsa Indonesia saat ini rakyat hanya dijadikan obyek dan “tambel butuh”, nasibnya tetap hidup dalam kemiskinan. Kaum elite politik dan elite kekuasaan yang hidup mewah. Kaum elite sudah kehilangan jati diri sebagai bangsa timur. Pancasila, UUD 45 dan amanat rakyat terus diingkari, politik kebangsaan telah berubah menjadi politik kepentingan.

Menurut Abdul Azi <sup>20</sup>Wahab (2009), “keterpurukan” bangsa saat ini disebabkan telah kehilangan jati diri bangsa. Jati diri bangsa yang digambarkan sebagai “kepribadian bangsa” itu pengalaman nilai-nilai moral dan norma Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk mengatasi keadaan itu dibutuhkan diantaranya upaya pemahaman baru kebangsaan untuk meniti jalan memahami dan memaknai kembali pengertian wawasan kebangsaan, untuk menent <sup>21</sup>kan kembali jati diri bangsa dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Hamengkubuwono X (2007) menawarkan perlunya merajut kembali keindonesiaan kita sebagai satu-satunya upaya untuk mengatasi krisis jati <sup>21</sup>diri kebangsaan yang melahirkan krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia, menguatnya budaya konsumerisme dan kekerasan, menipisnya kesadaran pluralisme dan semangat kebangsaan, tingginya kemiskinan dan pengangguran. Menegakkan kembali semangat kebangsaan, politik, kebangsaan, dan jati diri bangsa agar bangsa ini dapat kembali sepenuhnya berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, harus dimulai upaya untuk bangkit kembali dari keterpurukan dengan membangun gerakan pendidikan karakter.

### Pendidikan Karakter Sebagai Pondasi Kehidupan Multikultural

6

Menurut Wynne istilah “karakter” diambil dari bahasa Yunani “*charassian*” yang berarti *to mark* (menandai atau mengukit). Secara istilah terdapat dua pengertian, pertama, berkarakter menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku. Apabila seseorang berperilaku tidak jujur, kejam atau rakus, maka orang tersebut memanifulasikan karakter jelek, sebaliknya apabila seseorang berperilaku jujur, suka menolong, orang tersebut memanifulasikan karakter mulia. Kedua, karakter erat kaitannya dengan personality. Seseorang disebut berkarakter kalau tingkah lakunya sesuai dengan kaidah moral (Sauri, 2010). Thomas Lickona dalam (Suri, 2010) mengemukakan bahwa karakter terdiri atas tiga bagian yang saling terkait, yaitu pengetahuan tentang moral (*moral knowing*), perasaan moral (*moral feeling*), dan perilaku moral (*moral behavior*), karakter yang baik terdiri atas mengetahui kebaikan, mencintai atau menginginkan kebaikan dan melakukan kebaikan.

Enam hal penting yang harus diajarkan berkenaan dengan moral *knowing* yaitu; (1) moral *aweness* (kesadaran moral), (2) *knowing moral values* (mengetahui nilai-nilai moral), (3) *perspective taking*, (4) *moral reasoning*, (5) *decision making*, dan (6) *self knowledge*. Sedangkan *moral feeling* adalah aspek lain yang harus ditanamkan kepada peserta didik dan merupakan sumber energi dari diri manusia untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Terdapat 6 hal yang merupakan aspek emosi yang harus mampu dirasakan oleh seseorang untuk menjadi manusia berkarakter, yaitu; (1) *conscience* (nurani), (2) *self esteem* (percaya diri), (3) *empathy*, (4) *loving the good* (mencintai kebenaran), (5) *self control* (mampu mengontrol diri), (6) *humanity* (kerendahatian). Adapun *moral action* adalah bagaimana membuat pengetahuan moral dapat diwujudkan menjadi tindak nyata. Perbuatan moral ini merupakan hasil dari dua komponen karakter lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang dalam perbuatan yang baik, maka harus dilihat tiga aspek lain dari karakter, yaitu; (1) kompetensi (*commpetence*), (2) keinginan (*will*), (3) kebiasaan (*habit*).

18

Maxwell dalam Aswansi (2010) menegaskan bahwa karakter yang baik lebih dari sekedar perkataan, melainkan sebuah pilihan yang membawa kesuksesan. Ia bukan anugerah, melainkan dibangun sedikit demi sedikit, dengan pikiran, perkataan, perbuatan, kebiasaan, keuletakan, dan bahkan dibentuk dari kesulitan hidup. Zig Ziglar mengingatkan, bahwa perhatikanlah pikiranmu karena ia akan menjadi kata-katamu. Perhatikanlah kata-katamu karena ia akan menjadi perilakumu. Perhatikanlah perilakumu karena ia akan menjadi kebiasaanmu. Perhatikanlah kebiasaanmu-kebiasaanmu, karena ia akan menjadi karaktermu. Dan perhatikanlah karaktermu karena ia akan menjadi takdirmu. Jadi kata kunci “karakter” terbentuk dari adanya konsisten pada perkataan, perilaku, kebiasaan dan tindakan. Sekecil apapun ia akan membawa perubahan besar pada aspek kehidupan lainnya (Aswandi, 2010)

8

Membangun karakter (*character building*) tentu harus menjadi pilihan bagi semua orang, terutama bagi pemimpin bangsa ini. Presiden Susilo Bambang Yudoyono ketika membuka Temu Nasional (Indonesia Summit) tahun 2009 di Jakarta, menyampaikan pernyataan resmi dan meminta Mendiknas, Muhammad Nuh, untuk mengubah metodologi pembelajaran yang berpusat kepada siswa, agar mampu mendorong siswa menjadi kreatif dan inovatif, memunculkan semangat

kemandirian dan jiwa kewirausahaan anak didik serta menyelenggarakan pendidikan berbasis karakter (Kompas, 30 Oktober 2009).

Pendidikan karakter merupakan usaha sadar untuk mendidik peserta didik dengan menanamkan nilai-nilai kebaikan universal baik yang bersumber dari ajaran agama, tradisi dan budaya agar mereka kelak dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya (Sauri 2010). Tulis Kevin Ryan dan Thomas Likona dalam Megawangi (2004) bahwa semua masyarakat, tentu saja, harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar untuk bertahan. Mereka juga harus tumbuh dalam memahami apa artinya menjadi semua komunitas manusia, dalam memberikan kesempatan kepada setiap anggotanya untuk tumbuh secara utuh, dan dalam kapasitasnya untuk menangani problema etika yang timbul dari perubahan teknologi dan sosial lainnya. Lagi pula, harus belajar untuk berfungsi sebagai bagian dari komunitas dunia yang kompleks, dimana untuk terwujudnya perdamaian dunia dan keadilan membutuhkan suatu hubungan kerjasama yang kuat. Namun, apapun tugasnya; untuk bertahan atau tumbuh-kembang, setiap masyarakat, mau tidak mau bergantung kepada keberhasilannya dalam membentuk kualitas karakter masyarakatnya.

Pendidikan karakter memiliki korelasi yang intens dengan pendidikan multicultural. Pendidikan karakter merupakan fondasi bagi kehidupan multikultural. Orang yang berkarakter baik dan kuat tentu akan menampilkan sikap dan perbuatan yang baik. Demikian halnya bangsa yang berkarakter baik akan memiliki integritas, ketahanan, dan daya saing yang dapat diandalkan karena sikap dan kebijakan yang ditempuh selalu mencerminkan nilai-nilai moral, pandangan hidup, dan falsafah hidup bangsanya yang memberikan jaminan konkritisasi bagi pengakuan, penerimaan dan penghargaan terhadap kehidupan multikultural Syafiq A. Mughni merumuskan pendidikan multikultural sebagai wujud kesadaran tentang keanekaragaman kultur, hak-hak asasi manusia serta pengurangan atau penghapusan berbagai jenis prasangka atau *prejudise* untuk membangun suatu kehidupan masyarakat yang adil dan maju. pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai strategi untuk mengembangkan kesadaran atas kebanggaan seseorang terhadap bangsanya. (Mahfud 2009)

Pendidikan karakter memberikan penekanan pada seseorang untuk memiliki pengetahuan moral, perasaan/kesadaran moral, tindakan moral/melakukan kebaikan, memiliki potensi, keinginan, dan kebiasaan untuk membuat pengetahuan moral menjadi suatu tindakan nyata sebagai suatu pilihan yang membawa kesuksesan. Multikulturalisme sebagai suatu paham yang menekankan pada kesederajatan, pengakuan, penghargaan, dan kesetaraan budaya tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya lain. Orang yang berkarakter baik pasti menghargai, mengakui dan menfasati nilai kehidupan multikultural tersebut.

## Simpulan

Multikulturalisme merupakan keniscayaan historis dan antropologis kehidupan bangsa Indonesia. Fakta-fakta sosial dan identitas primordial terus bertumbuh dan berkembang, tidak ada satu kekuatan manapun yang dapat menapikannya, keberadaannya menjadi potensi dan kekuatan bangsa sekaligus menjadi ancaman bagi disintegrasi bangsa, atau setidaknya menyumbang instabilitas bagi pembangunan, terutama ketika identitas primordial yang bersifat local genius tidak diapresiasi, diakomodasi dan direduksi sebagai satu kesatuan semangat kebangsaan dan kemetian sosiologis secara wajar dan elegan. Pendidikan karakter menjadi pilihan strategis dalam memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa. Pendidikan karakter membawa pada kemandirian yang melahirakan semangat pembebasan. Kemandirian identitas lokal yang bersifat primordial akan meningkatkan daya saing entitas multikultural dalam pergaulan hidup pada berbagai dimensi kehidupan sosial-budaya, ekonomi, politik dan keamanan. Kelompok suku bangsa yang memiliki karakter dan kepribadian yang kuat serta mandiri akan dapat memaksa pihak lain untuk memberikan pengakuan dan penghargaan bukan saja atas dasar prestise (suku, agama, daerah, adat isitiadat) tetapi juga prestasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aswandi. "Membangun Bangsa Melalui Pendidikan Berbasis Karakter", dalam *Jurnal Pendidikan Karakter, Publikasi Ilmiah Pendidikan Umum dan Nilai*, Vol. 2 No. 2 Juli 2010.



- Buwono X, Sultan Hamengku. 2007. *Merajut Kembali Keindonesiaan Kita*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djahiri, H.A. Kosasih. *Esensi Pendidikan Nilai Moral dan PKN di Era Globalisasi, dalam Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan menyambut 70 Tahun Prof. Drs. H.A. Kosasih Djahiri*, Bandung Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) FPIPS-UPI, 2006.
- Husaini, Adian, *Wajah Peradaban Barat Dari Hegomoni Kristen Ke Dominasi Sekular-Liberal*, Jakarta, Gema Insani, 2005.
- Koesman, Soegeng. *Membangun Karakter Bangsa Carut Marut dan Cdontang-Perenang Krisis Multi Dimensi di Era Reformasi*, Yogyakarta Lokus Tiara Wacana, 2009.
- Kymlicka, Will. *Kewarganegaraan Multikultural*, Jakarta: LP3ES, 2002.
- Mahfud, Choirul. *Mendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Megawangi, Ratna. *Pendidikan Karakter Sosial Yang Tepat Untuk Membangun Bangsa*, 2004.
- Sauri, Sofyan. *Strategi Implementasi Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi*, Makalah disampaikan pada Seminar Internasional & Workshop Pendidikan Karakter Menuju Terbentuknya Masyarakat yang Berbudi Pekerti Luhur, PU & Nilai UPI Bandung, Tanggal 6 Oktober 2010.
- Wahab, Abdul Azis. "Memantapkan Kembali Jatidiri Bangsa dalam Rangka Penguatas Dasar-Dasar Pendidikan Kewarga-negaraan Indonesia", *Makalah* disampaikan pada Seminar Pendidikan Kewarganegaraan, UPI, Bandung, Tanggal 12 Desember 2009.
- Winaputra, Udin. *Multikulturalisme-Bhineka Tunggal Ika dalam Perspektif PKN Sebagai Wahana Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia, dalam "Acta Civicus, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Pascasarjana UPI., Volume 2, No 1 Oktober 2008.*

## Artikel 2

---

### ORIGINALITY REPORT

---

68%

SIMILARITY INDEX

67%

INTERNET SOURCES

22%

PUBLICATIONS

44%

STUDENT PAPERS

---

### PRIMARY SOURCES

---

1	<a href="http://studylib.net">studylib.net</a> Internet Source	10%
2	<a href="http://file.upi.edu">file.upi.edu</a> Internet Source	10%
3	<a href="http://sejarah.upi.edu">sejarah.upi.edu</a> Internet Source	9%
4	<a href="http://repository.iainambon.ac.id">repository.iainambon.ac.id</a> Internet Source	4%
5	<a href="http://faridnst.blogspot.com">faridnst.blogspot.com</a> Internet Source	4%
6	<a href="http://www.neliti.com">www.neliti.com</a> Internet Source	3%
7	<a href="http://repository.iainpurwokerto.ac.id">repository.iainpurwokerto.ac.id</a> Internet Source	3%
8	<a href="http://eprints.umm.ac.id">eprints.umm.ac.id</a> Internet Source	2%
9	<a href="http://ardeanzuhur.blogspot.com">ardeanzuhur.blogspot.com</a> Internet Source	2%

---

10	<a href="http://berita.upi.edu">berita.upi.edu</a> Internet Source	2%
11	<a href="http://wulyretno.wordpress.com">wulyretno.wordpress.com</a> Internet Source	2%
12	<a href="http://ejournal.iainbengkulu.ac.id">ejournal.iainbengkulu.ac.id</a> Internet Source	2%
13	<a href="http://jurnal.stkippgri-bkl.ac.id">jurnal.stkippgri-bkl.ac.id</a> Internet Source	2%
14	<a href="http://armanbram.blogspot.com">armanbram.blogspot.com</a> Internet Source	1%
15	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	1%
16	<a href="http://bahasa-dan-sastra-indonesi83a.blogspot.com">bahasa-dan-sastra-indonesi83a.blogspot.com</a> Internet Source	1%
17	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	1%
18	<a href="http://repository.uin-malang.ac.id">repository.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	1%
19	<a href="http://muhammad-monaadha.blogspot.com">muhammad-monaadha.blogspot.com</a> Internet Source	1%
20	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	1%
21	<a href="http://journals.itb.ac.id">journals.itb.ac.id</a>	

Internet Source

1 %

22

Submitted to Universitas Negeri Surabaya The  
State University of Surabaya

Student Paper

1 %

23

[eprints.uny.ac.id](http://eprints.uny.ac.id)

Internet Source

1 %

24

[etheses.uin-malang.ac.id](http://etheses.uin-malang.ac.id)

Internet Source

1 %

25

[forumtjk.blogspot.com](http://forumtjk.blogspot.com)

Internet Source

1 %

26

[asopi.files.wordpress.com](http://asopi.files.wordpress.com)

Internet Source

1 %

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 1%

Exclude bibliography  On